

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai seberapa besar faktor-faktor seperti kompetisi politik, *leverage*, ukuran pemda, opini audit, kompleksitas pemda, sumber daya manusia, dan gaya kepemimpinan dapat memengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ. Penelitian ini dilakukan terhadap 34 sampel, yakni pemerintah tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kompetisi politik berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet karena semakin tinggi kompetisi politik akan mendorong pemda memenuhi kebutuhan pengawasan para pesaing politik dan masyarakat akan janji-janjinya ketika pemilu. Selanjutnya, sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet karena semakin baik sumber daya manusia menunjukkan kepatuhan pemda terhadap peraturan yang telah dibuat mengenai keterbukaan informasi keuangan serta mendorong pemda untuk menggunakan internet sebagai media publikasi laporan keuangan.

Penelitian ini gagal menemukan bukti bahwa leverage, ukuran pemda, kompleksitas pemda, opini audit dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ.

## **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

### 1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi politik dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dan teori *signaling* bahwa pemerintah akan berusaha dalam memperlihatkan kinerjanya agar mendapat kepercayaan serta dukungan dari masyarakat untuk membantu pemerintah menjalankan tanggungjawabnya yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini juga sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh masyarakat.

### 2. Implikasi Praktis

Memberikan memotivasi kepada pemerintah daerah untuk mulai mengembangkan *e-government* karena internet sangat berperan penting untuk memudahkan dan mendekatkan komunikasi antara pemerintah

dengan masyarakat, selain itu masyarakat juga dapat menjadi media penilaian mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

### **C. Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Pengukuran untuk variable tipe kepemimpinan belum efektif
2. Masih rendahnya kemampuan variable independen yang digunakan untuk memengaruhi variable dependen yang diuji
3. Ketidakconsistenan peletakkan konten tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dalam website pemda.
4. IPM yang digunakan masih berupa indeks pembangunan provinsi
5. Penggunaan variabel dummy kurang mampu untuk menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian diatas, peneliti menyarankan hal – hal sebgai berikut:

1. Membuat proksi pengukuran untuk mengukur tipe kepemimpinan
2. Menambahkan variable lain yang diduga dapat memengaruhi publikasi LKPD misalnya jumlah SKPD, kemandirian pemda.
3. Penggunaan keyword yang secara spesifik dalam mencari konten TPAD pemda.
4. Membuat indeks baru yang lebih spesifik untuk mengukur tingkat pembangunan dalam pemda sehingga dapat digunakan sebagai alternatif proksi pengukuran kualitas SDM.

5. Membuat metode pengukuran lain yang dapat membuktikan pengaruh secara lebih spesifik misalnya skoring.